



PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM IMPLEMENTASI POAC
SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN
KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Jl. Jendral Sudirman, Km. 5,5, Pasir Putih, Mentawa Baru,
Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalteng 74322

Tahun 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN	4
C. RUANG LINGKUP	5
D. PENGERTIAN.....	5
BAB II STRATEGI PERENCANAAN (PLANNING) IMPLEMENTASI POAC SEBAGAI SIMANTAP DI KAB.KOTIM	
A. MELAKUKAN ANALISIS SKPG.....	9
B. MELAKUKAN ANALISIS NBM DAN PPH	14
C. MENYUSUN RENJA DKP KAB.KOTIM.....	24
D. MENYUSUN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI DAERAH.....	25
E. MENYUSUN REGULASI CADANGAN PANGAN KAB.KOTIM	26
BAB III STRATEGI PENGORGANISASIAN (ORGANIZING) DAN PENGARAHAN (ACTUATING) IMPLEMENTASI POAC SEBAGAI SIMANTAP DI KAB.KOTIM	
A. PENGORGANISASI TIM KERJA UNTUK PENCAPAIAN TARGET JANGKA PANJANG	27
B. PENGORGANISASIAN TIM EFEKTIF UNTUK PENCAPAIAN TARGET JANGKA PENDEK DAN MENENGAH	33
C. MEMBENTUK TIM DAN MEMAKSIMALKAN DKP KAB.KOTIM	35
BAB IV STRATEGI PENGAWASAN (CONTROLLING) IMPLEMENTASI POAC SEBAGAI SIMANTAP DI KAB.KOTIM	40
BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI	
A. PELAPORAN.....	42
B. EVALUASI	43
BAB VI PENUTUP	44

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami diberikan kemampuan serta kesehatan dalam menyelesaikan Pedoman Umum berupa Juknis Implementasi POAC sebagai “SIMANTAP” (Strategi Pembangunan Kemandirian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur) dengan tepat waktu.

Pembangunan ketahanan pangan menjadi salah satu misi pembangunan ekonomi Bupati Kotawaringin Timur. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan bagian integral ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Untuk memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan kabupaten yang berbasis pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan daerah yaitu Program Implementasi POAC sebagai Strategi Pembangunan Kemandirian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pedoman Pelaksanaan Program Implementasi POAC ini disusun untuk memberikan acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, di daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, anggaran, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pembangunan ketahanan pangan, sehingga pelaksanaan program Implementasi POAC sesuai dengan yang direncanakan, berjalan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan output yang maksimal. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Juknis Implementasi POAC ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan serta kekurangan, baik dari aspek bahasa maupun materi yang disajikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami siap untuk menerima saran, kritik dan masukan guna kesempurnaan juknis ini.

Sampit, 31 Agustus 2017

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Ir. JAKATAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19601212 198803 1 024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal

Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian Ketahanan Pangan dilakukan dengan berlandaskan pada Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan. Kemandirian pangan diartikan bahwa pangan yang beraneka ragam harus dapat dipenuhi dari kemampuan dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menekankan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat

dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub-sistem ketahanan pangan, yang mencakup: (1) Sub-sistem ketersediaan pangan; (2) Sub-sistem keterjangkauan pangan; serta (3) Sub-sistem konsumsi pangan dan gizi. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengusahakan pencapaian ketahanan pangan bagi negara hingga tingkat perseorangan dengan berlandaskan pada kemandirian dan kedaulatan pangan.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara teknis pembangunan ketahanan pangan di daerah, Dinas Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tugas pokok adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan bertumpu pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan di daerah. Target capaian kinerja RPJMD 2016 – 2021 adalah meningkatnya ketahanan pangan di daerah berdasarkan

pencapaian rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut ditetapkan visi Dinas Ketahanan Pangan dalam perencanaan strategis yaitu “*Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan*”. Sedangkan misinya adalah : *Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan. Penganekaragaman dan Mutu Pangan*. Penetapan misi tersebut diarahkan untuk mewujudkan :

- Peningkatan tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima
- Pemantapan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.
- Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan penganekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Dinas Ketahanan Pangan melalui bidang ketersediaan dan distribusi pangan merekonstruksi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban kedalam kerangka kerja pembangunan bidang ketersediaan dan distribusi pangan dengan salah satu strategi peningkatan dan kemandirian pangan adalah mengoptimalkan sistem manajemen (POAC) dalam organisasi yang meliputi fungsi perencanaan (*Planning*),

pengorganisasian (*Organizing*), pengarahannya (*Actuating*) dan pengawasannya (*controlling*). Implementasi sistem POAC ini merupakan terobosan baru yang akan diprogramkan kedepan dalam rangka pelaksanaan salah satu fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Tujuan dan Strategi Pelaksanaan

Tujuan program implementasi sistem POAC ini disusun sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan baik oleh aparat pemerintahan dan seluruh stakeholder yang bergerak dibidang pertanian dan pangan di daerah Kotawaringin Timur.

Strategi yang dikembangkan dalam pelaksanaan program implementasi POAC ini adalah :

1. Optimalisasi penyediaan data ketahanan pangan secara akurat diataranya hasil analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan.
2. Meningkatkan kemampuan sumberdaya petani dalam penguasaan manajemen administrasi;
3. Menyusun Sasaran Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan 2017;
4. Penyusunan SK Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotim dan optimalisasi strategi kinerjanya;
5. Penyusunan Regulasi tentang Cadangan Makanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Optimalisasi penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basis data yang transparan dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup program implementasi sistem manajemen POAC sebagai Strategi Pembangunan Kemandirian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin ini meliputi :

1. Penyediaan data analisis kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan melalui kegiatan analisis ketersediaan pangan pokok dan gizi;
2. Peningkatan kemampuan sumberdaya petani dalam penguasaan manajemen administrasi;
3. Penyusunan Sasaran Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan 2017;
4. Penyusunan SK Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotim dan strategi Kinerjanya;
5. Penyusunan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Cadangan Makanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Pengawasan dan pengendalian melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. **Manajemen** adalah adalah Sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya

2. **Planning (perencanaan)** adalah susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu.
3. **Organizing (pengorganisasian)** adalah aktifitas dalam melakukan penyusunan tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan untuk mencapai target organisasi yang efektif dan efisien.
4. **Actuating (Pengarahan)** adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
5. **Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)** adalah serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.
6. **Neraca Bahan Makanan (NBM)** adalah salah satu metode penilaian gizi secara tidak langsung.
7. **Pola Pangan Harapan (PPH)** merupakan susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energinya baik secara absolute maupun relatif terhadap total energi penyediaan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa.
8. **Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (DKP)** adalah bertugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan evaluasi, dan

melakukan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

9. **Pangan** adalah Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. **Kedaulatan Pangan** : Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
11. **Kemandirian Pangan** : Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
12. **Ketahanan Pangan** : Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

13. **Swasembada Pangan** : Usaha mencukupi kebutuhan padi, jagung, kedelai, gula, dan daging/karkas melalui produksi dalam negeri.
14. **Cadangan Pangan** : Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
15. **Krisis Pangan** adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. **Pola Konsumsi Pangan** : adalah susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu, serta juga dapat menunjukkan tingkat keberagaman pangan masyarakat yang selanjutnya dapat diamati dari parameter Pola Pangan Harapan (PPH).
17. **Nilai Tambah Produk** : Kandungan dan/atau kegunaan produk/jasa tambahan yang dapat memberikan nilai lebih terhadap produk.
18. **Gizi Seimbang** : Kepenuhan nutrisi yang tepat dalam jumlah, waktu, dan komposisi.

BAB II
STRATEGI PERENCANAAN (PLANNING)
IMPLEMENTASI POAC SEBAGAI STRATEGI KEMANDIRIAN DAN
KETAHANAN PANGAN DI KAB.KOTAWARINGIN TIMUR

A. Melakukan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Situasi pangan dan gizi suatu daerah pada kegiatan SKPG, secara garis besar dibagi menjadi dua komponen, yaitu situasi pangan dan situasi gizi. Situasi pangan mencakup dua aspek pembahasan, yaitu aspek ketersediaan dan aspek akses. Aspek ketersediaan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan produksi bahan pangan yang berpengaruh pada kecukupan konsumsi bahan pangan. Sedangkan aspek akses berkaitan dengan fluktuasi harga pangan dan berpengaruh pada daya beli masyarakat untuk mengakses bahan pangan. Situasi gizi suatu masyarakat berkaitan dengan kondisi kesehatan balita, dimana berpengaruh pada tumbuh kembang balita. Situasi tersebut akan menggambarkan kondisi kecukupan pangan suatu daerah dan potensi terjadinya ketidakcukupan pangan

1. Analisis Bulanan

- Aspek Ketersediaan Pangan

Indikator yang digunakan pada aspek ketersediaan adalah luas tanam dan luas puso dari empat komoditas, yaitu padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Berdasarkan analisis, akan diperoleh persentase luas tanam dan luas puso pada bulan berjalan/bulan analisis dibanding dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkutan lima tahun terakhir. Nilai persentase yang dihasilkan akan menunjukkan tingkat rawan pangan wilayah tersebut.

Tabel 1. Persentase peningkatan/penurunan Luas tanam dan luas puso

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
		$r \geq 5$	1 = Aman
		$-5 \leq r < 5$	2 = Waspada
		$-r < -5$	3 = Rawan
		$r < -5$	1 = Aman
		$5 \leq r < -5$	2 = Waspada
		$r > 5$	3 = Rawan

- Akses Pangan

Aspek akses pada analisis SKPG bulanan menggunakan indikator fluktuasi delapan komoditas harga pangan. Hasil analisis akan menghasilkan persentase rata-rata harga bulan berjalan delapan komoditas dibandingkan dengan rata-rata harga tiga bulan sebelumnya. Berdasarkan nilai persentase yang dihasilkan akan menunjukkan tingkat rawan pangan wilayah tersebut.

Tabel 2. Persentase Peningkatan/Penurunan Harga Delapan Komoditas

No.	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
		$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		$r > 20$	3 = Rawan
		$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
		$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
		$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
		$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 =
		> 15	3 = Rawan
		$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 =
		> 15	3 = Rawan

7	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas daging ayam dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
		$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan

- Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek ketiga yaitu aspek pemanfaatan, menggunakan indikator kesehatan balita. Ada tiga indikator yang digunakan untuk analisis SKPG bulanan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Bobot Persentase kesehatan balita

No	Indikator	Persentase (r)	Bobot
		$r > 90$	1 = Aman
		$80 \leq r \leq 90$	2 = Waspada
			3 = Rawan
		$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 10$	2 = Waspada
		> 10	3 = Rawan
		$r < 10$	1 = Aman
		$10 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		> 20	3 = Rawan

2. Analisis SKPG Tahunan

- Aspek ketersediaan

Situasi pangan dan gizi pada aspek ketersediaan pangan tahunan diketahui berdasarkan angka rasio ketersediaan pangan. Ini diperoleh dengan menghitung ketersediaan pangan sereal per kapita per hari dibanding nilai konsumsi normatif (300 gram).

Tabel 4. Nilai Rasio Ketersediaan Tahunan

Indikator	Nilai (r)	Bobot	Warna
	$r > 1,14$	1	Hijau
	$0,90 < r \leq$	2	Kuning
	$r < 0,90$	3	Merah

- Aspek Akses Pangan

Aspek akses pangan dinilai dengan pendekatan persentase KK Pra-KS dan KS-1 alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir.

Tabel 5. Nilai Persentase KK Pra-KS dan KS-1

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
	$r < 20$	1	Hijau
	$20 \leq r < 40$	2	Kuning
	≥ 40	3	Merah

- Aspek Pemanfaatan Pangan

Indikator status gizi balita yang dinilai dengan prevalensi gizi kurang pada balita di masing-masing yang dikumpulkan sekali setahun melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG).

Tabel 6. Nilai Persentase Prevalensi Gizi Kurang Balita

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
	$r < 15$	1	Hijau
	$15 \leq r \leq 20$	2	Kuning
	> 20	3	Merah

Dalam melakukan analisis SKPG, komoditas pangan yang dianalisis merupakan komoditas yang ada dan menjadi bahan pangan utama atau bahan pangan strategis di wilayah tersebut.

B. Melakukan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH

Neraca Bahan Makanan sendiri mempunyai keterkaitan dengan ketersediaan makanan suatu wilayah, baik dari sisi produksi pangan dan akses makanan, yang secara tidak langsung mempengaruhi status gizi masyarakat di wilayah tersebut.

Neraca Bahan Makanan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pangan suatu wilayah secara menyeluruh dan secara operasional memberi gambaran proyeksi mengenai kebutuhan penyediaan dan produksi atau penyediaan pangan.

Cara Pengisian Tabel NBM

Pengisian dilakukan secara rutin kolom demi kolom.

Kolom 1 : Jenis bahan makanan. Tuliskan nama seluruh bahan makanan sesuai dengan kelompok komoditas pada kolom (1).

- Kolom 2 : Produksi (masukan). Tuliskan angka produksi yang masih akan mengalami perubahan bentuk (bila ada) pada kolom (2).
- Kolom 3 : Produksi (keluaran). Tuliskan pada kolom (3) angka unsur produksi yang merupakan produksi asli yang diperoleh dari kegiatan memproduksi dan belum mengalami perubahan atau produksi turunan yang sudah mengalami perubahan.
- Kolom 4 : Perubahan stok. Tuliskan angka perubahan stok (bila ada) pada kolom (4) berikut tandanya : negatif (-) atau positif (+).
- Kolom 5 : Impor. Tuliskan pada kolom (5) angka jumlah bahan makanan yang masuk dari negara lain atau wilayah lain.
- Kolom 6 : Penyediaan Dalam Negeri sebelum Ekspor. Tuliskan pada kolom (6) angka hasil dari produksi (keluaran) dikurangi perubahan stok ditambah impor.
- Kolom 7 : Ekspor. Tuliskan pada kolom (7) angka jumlah bahan makanan yang dikeluarkan wilayah administratif/daerah ke luar negeri maupun ke wilayah lain baik melalui laut, darat maupun udara.
- Kolom 8 : Penyediaan Dalam Negeri. Tuliskan pada kolom (8) angka hasil dari Penyediaan Dalam Negeri sebelum ekspor kolom (6) dikurangi ekspor pada kolom (7).
- Kolom 9 : Pakan Tuliskan angka pakan pada kolom (9). Untuk menghitung kebutuhan pakan dapat digunakan dua cara yaitu :

- a. Hasil perkalian antara total populasi ternak (diluar ayam dan unggas) dengan ransum masing-masing jenis makanan atau
- b. Hasil perkalian antara persentase pakan dengan penyediaan dalam negeri.

Kolom 10 : Bibit/benih. Tuliskan pada kolom (10) angka hasil perkalian antara jumlah kebutuhan bibit kg/Ha dengan luas tanam bersih pada tahun penyusunan NBM untuk tanaman pangan dan persentase yang digunakan untuk bibit dengan penyediaan dalam negeri untuk jenis komoditas lainnya. Untuk menghitung kebutuhan bibit, khususnya untuk tanaman pangan ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh: luas panen dikalikan dengan kebutuhan bibit per hektar.

Kolom 11: Diolah untuk makanan. Tuliskan pada kolom (11) angka banyaknya komoditas bahan makanan yang berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk makanan, bila ada.

Kolom 12 : Diolah untuk bahan makanan Tuliskan pada kolom (12) angka banyaknya komoditas bahan makanan yang berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk keperluan bukan makanan, bila ada.

Kolom 13 : Tercecer Tuliskan pada kolom (13) angka hasil perkalian persentase tercecer dengan penyediaan dalam negeri untuk masing-masing komoditas .

Kolom 14 : Bahan makanan Tuliskan pada kolom (14) angka jumlah bahan makanan yang tersedia dikonsumsi penduduk. Angka tersebut merupakan hasil

dari : kolom (8)-kolom (9)-kolom (10)-kolom(11)-kolom (12)-kolom (13).

Kolom 15 : Kg/Tahun(Kg/year). Tuliskan pada kolom (15) angka hasil pembagian kolom (14) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. $\text{Kg/Tahun} = \text{kolom (14)}/\text{penduduk pertengahan tahun} * 1000$.

Dikalikan 1000 karena konversi dari ton ke kilogram

Kolom 16 : Gram/Hari (*Gram/Day*) Tuliskan pada kolom (16) hasil pembagian kolom (15) dengan jumlah hari dalam satu tahun dikali 1000. $\text{Gram/Hari} = (\text{kolom (15)})/365 \text{ hari} * 1000$.

Dikalikan 1000 karena konversi dari kilogram ke gram.

Kolom 17 : Energi, Kalori/hari (*Energy, cal/Day*). Tuliskan pada kolom (17) angka hasil perkalian kolom (16) dengan persen bagian yang dapat dimakan (b.d.d), kemudian kalikan dengan kandungan energi dari 100 gram bahan makanan.

$\text{Energi kalori/hari} = \text{kolom (16)} * \text{b.d.d} * \text{kandungan energi:100}$.

Kolom 18 : Protein, Gram/Hari (*Protein Gram/Day*) Tuliskan pada kolom (18) angka hasil perkalian kolom (16) dengan persen bagian yang dapat dimakan, kemudian kalikan dengan kandungan protein dari 100 gram bahan makanan.

$\text{Protein gram/hari} = \text{Kolom (16)} * \text{B.d.d} * \text{kandungan protein:100}$.

Kolom 19 : Lemak Gram/hari (*Fats Gram/day*). Tuliskan pada kolom (19) angka hasil perkalian kolom (16) dengan persen bagian yang dapat dimakan, kemudian kalikan

dengan kandungan lemak dari 100 gram bahan makanan.

Lemak Gram/hari =kolom (16)*B.d.d*kandungan lemak:100:

Ketersediaan perkapita pada kolom (15) s.d kolom (19) merupakan ketersediaan bahan makanan yang bersangkutan untuk konsumsi perkapita (*percapita consumption*).Perlu ditegaskan bahwa angka ini bukanlah jumlah yang benar-benar dimakan,melainkan yang tersedia di tingkat pengecer atau sampai ke konsumen Tuliskan ketersediaan perkapita untuk vitamin dan mineral pada tabel lanjutan.

Kolom 20 : Vitamin A,S1/hari(*IU/day*) Tuliskan pada kolom (20)angka hasil perkalian pada kolom (16)dengan persen bagian yang dapat dimakan,kemudian kalikan dengan kandungan vitamin A dari 100 Gram bahan makanan.

Vitamin A,S1/hari =kolom (16)*B.d.d*kandungan vitamin A:100.

Kolom 21 : Vitamin B1,mg/hari(*milligram/day*) Tuliskan pada kolom (21) angka hasil perkalian kolom (16) dengan persen bagian yang dapat dimakan,kemudian kalikan dengan kandungan vitamin B1 dari 100 gram bahan makanan.

Vitamin B1,mg/hari =kolom(16)*B.d.d*kandungan vitamin B1:100.

Kolom 22 : Vitamin C,mg/hari(*miligram/day*) Tuliskan pada kolom (22)angka hasil perkalian pada kolom (16)dengan

persen bagian yang dapat dimakan, kemudian kalikan dengan kandungan vitamin C dari 100 gram bahan makanan.

Vitamin C, mg/hari = kolom (16) * B.d.d * kandungan vitamin C : 100.

Kolom 23 : Kalsium (calcium) mg/hari (miligram/day) Tuliskan pada kolom (23) angka hasil perkalian pada kolom (16) dengan persen bagian yang dapat dimakan, kemudian kalikan dengan kandungan kalsium dari 100 gram bahan makanan.

Kalsium, mg/hari = kolom (16) * B.d.d * kandungan kalsium : 100.

Kolom 24 : Fosfor (phosphor), mg/hari (miligram/day) Tuliskan pada kolom (24) angka hasil perkalian pada kolom (16) dengan persen bagian yang dapat dimakan, kemudian kalikan dengan kandungan fosfor dari 100 gram bahan makanan.

Fosfor, mg/hari = kolom (16) * B.d.d * kandungan fosfor : 100.

Kolom 25 : Zat besi (Iron) mg/hari (miligram/day). Tuliskan pada kolom (25) angka hasil perkalian pada kolom (16) dengan persen bagian yang dapat dimakan, kemudian kalikan dengan kandungan kalsium dari 100 gram bahan makanan.

Zat Besi, mg/hari = kolom (16) * B.d.d * kandungan zat besi : 100.

Mekanisme penyusunan Neraca Bahan Makanan :

1. Pengumpulan data yang diperlukan
2. Konsolidasi data
3. Penyusunan data oleh tim

4. Analisis ketersediaan pangan wilayah
5. Pelaporan atau publikasi
6. Advokasi

Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energinya baik secara absolute maupun relatif terhadap total energi penyediaan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah.

Data konsumsi pangan secara riil dapat menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan dan menggambarkan tingkat kecukupan pangan dalam rumah tangga. Perkembangan tingkat konsumsi pangan tersebut secara implicit juga merefleksikan tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat terhadap pangan.

Adapun beberapa kegunaan analisis ini adalah sebagai berikut :

- a. Menilai jumlah dan komposisi konsumsi atau ketersediaan pangan.

- b. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau ketersediaan pangan.
- c. Sebagai baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah.
- d. Sebagai baseline data untuk menghitung proyeksi penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.
- e. Perencanaan konsumsi, kebutuhan dan peyediaan pangan wilayah.

Perhitungan PPH (Pola Pangan Harapan)

Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu:

- a. Menghitung energi dan zat gizi

Energi dihitung dari total energi yang dikonsumsi dari masing-masing bahan pangan. Pada cell energi pada sheet PPH diketik = SUM (data energi setiap golongan bahan pangan pada sheet konsumsi). Selanjutnya dihitung jumlah total energi untuk semua golongan bahan pangan dengan cara ketik = SUM (data energi setiap golongan bahan pangan dari padi-padian sampai yang lainnya).

- b. Menghitung % energy dan zat gizi

Menghitung persentase energi energy energy adalah dengan membagi energi setiap golongan dengan energi total untuk semua golongan. Caranya adalah dengan mengetik = cell setiap golongan / cell total energy*100.

- c. Menghitung % angka kecukupan energy dan zat gizi

Untuk menghitung persentase Angka Kecukupan Energi adalah dengan membandingkan persentase energy energy dengan angka kecukupan energi (2000 kkal) dikali 100.

Untuk rumus formulanya dapat ditulis dengan mengetik = cell % energy / 2000*100.

d. Menghitung skor AKE

Untuk menghitung skor angka kecukupan energi (AKE) adalah dengan memasukkan kolom bobot untuk setiap golongan pangan terlebih dahulu. Bobot menggambarkan kontribusi setiap golongan bahan pangan dalam menyumbangkan energi. Misalnya untuk golongan padi-padian bobotnya adalah 0.5, umbi-umbian 0.5 panga hewani 2.0 dan seterusnya. Selanjutnya adalah menghitung skor aktual energi setiap golongan bahan pangan yaitu dengan mengalikan persentase AKE setiap golongan bahan pangan dengan bobot setiap golongan bahan pangan.

Data konsumsi pangan dikelompokkan sesuai dengan pengelompokkan yang ada didalam Pola Pangan Harapan. Pengelompokkan tersebut disederhanakan menjadi 9 kelompok bahan pangan yaitu kelompok :

Tabel 7. Tabel Pengelompokan Bahan Pangan

No	Kelompok pangan	Bahan pangan
1	Padi	Beras, Jagung, terigu
2	Umbi-umbian	Ubi kayu, Ubi jalar, Kentang, Talas, Sagu, dan Umbi lainnya
3	Pangan hewani	Daging, Telur, Susu, dan Ikan
4	Minyak dan lemak	Minyak kelapa, minyak lainnya
5	Buah Biji Berminyak	Kelapa, Kemiri, Jambu mente, Coklat

6	Kacang-kacangan	Kedelai, Kacang tanah, Kacang Hijau, Kacang Merah, kacang lainnya
7	Gula	Gula pasir dan Gula Merah
8	Sayur dan Buah	Semua jenis sayuran dan Buah-Buahan
9	Lain-lain	Bumbu-bumbuan, makanan dan minuman yang mengandung alkohol, teh, kopi, sirup, dll

Data yang didapat sesuai dengan pengelompokkan tersebut selanjutnya dibandingkan antara skor konsumsi pangan aktual dengan sasaran PPH Nasional dan dilakukan analisis secara deskriptif,

Tabel 8. Kriteria Pemberian Bobot Untuk Setiap Kelompok Pangan

No	Kelompok Pangan	Bobot	Kriteria
1.	Padi-padian	0,5	Konsentrasi energi
2.	Umbi-umbian	0,5	Konsentrasi energi
3.	Pangan hewani	2,0	Zat gizi esensial ,cita rasa,kepadatan energi
4.	Lemak dan Minyak	1,0	Konsentrasi ener
5.	Buah dan Biji berminyak	0,5	Konsentrasi energi
6.	Kacang-kacangan	2,0	Nilai gizi pemakan nabati
7.	Gula	0,5	Konsentrasi energi
8.	Sayur dan Buah	2,0	Zat gizi mikro,volume,kandungan serat
9.	Lain-lain	0,0	Penambah cita rasa

Dengan PPH tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi yang diketahui tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang di dukung oleh cita rasa ,daya cerna, daya terima masyarakat ,kuantitas dan kemampuan daya beli . Dengan pendekatan PPH ini dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan.

C. Menyusun Rencana Kerja Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Secara garis besar, rencana kerja DKP Kabupaten Kotawaringin Timur, mengacu kepada dalam Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi DKP Nasional 2015-2019 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan

- a. Pengelolaan Sumber Daya Lahan
- b. Peningkatan Produksi Pangan Strategis yang Berdaya Saing
- c. Pengembangan Cadangan Pangan Pusat, Daerah, dan Masyarakat
- d. Pengaturan Ekspor dan Impor Pangan
- e. Memperkuat Hilirisasi Pertanian

2. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat

- a. Efisiensi Pemasaran
- b. Stabilisasi Harga di Tingkat Petani dan Konsumen
- c. Penanganan Rawan Pangan (transien dan kronis) -
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Bersubsidi -
Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Pedesaan

3. Pemanfaatan dan Keamanan Pangan

- 1) Pengembangan Pangan Lokal

2) Keamanan Pangan

4. Penanganan Masalah Gizi

5. Penguatan Kelembagaan Pangan

- 1) Regenerasi Petani
- 2) Penguatan Organisasi Petani/Nelayan
- 3) Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pangan dan Gizi
- 4) Penguatan Koordinasi Kelembagaan Pangan
 - Penguatan Dewan Ketahanan Pangan
 - Penguatan Kemitraan

D. Menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah

Bupati menyusun program aksi Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memperhatikan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi Nasional, arahan Ketua DKP/Presiden, dan kebijakan ketahanan pangan provinsi. Penyusunan program aksi ketahanan pangan daerah disesuaikan dengan potensi dan kepentingan yang ada di masing-masing wilayah. Program aksi ketahanan pangan daerah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Anggota DKP di masing-masing tingkatan dan wajib dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah disepakati. Sekretariat DKP Kabupaten Kotawaringin Timur mendorong fasilitasi program aksi ketahanan pangan daerah.

E. Menyusun Regulasi Cadangan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penyusunan Regulasi Cadangan pangan Kabupaten sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras oleh pemerintah dan Panduan pengelolaan cadangan pangan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2013.

Bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, perlu adanya penyediaan cadangan pangan di kabupaten yang merupakan bagian dari sub system cadangan pangan nasional.

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, setiap kabupaten harus memiliki cadangan pangan sebanyak 100 (seratus) ton setara beras.

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Kabupaten sebagai cadangan beras Pemerintah Kabupaten dan dikelola oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan.

Memperhatikan alasan tersebut diatas, maka bagian strategi yang dilakukan adalah menyusun Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Cadangan Pangan Kabupaten.

BAB III.
STRATEGI PENGORGANISASIAN DAN PENGARAHAN
(ORGANIZING DAN ACTUATING) IMPLEMENTASI POAC SEBAGAI
STRATEGI KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DI KAB.KOTAWARINGIN TIMUR

Pengorganisasian merupakan aktifitas dalam melakukan penyusunan tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan untuk mencapai target organisasi yang efektif dan efisien. Sesuai dengan perencanaan yang dilakukan meliputi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, maka untuk mengorganisasikan kegiatan kantor dalam mencapai target jangka panjang dan jangka pendek juga dilakukan penyusunan tim kerja dalam bentuk jangka panjang dan jangka pendek. Fungsi pengorganisasian (*organizing*) tidak lain adalah pembagian kerja, artinya penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, mengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikannya kepada setiap karyawan, serta menetapkan hierarki dan hubungan-hubungan.

A. Pengorganisasi Tim Kerja untuk Pencapaian Target Jangka Panjang

Proses pengorganisasian tim kerja untuk pencapaian target jangka panjang disusun sesuai peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Agar pelaksanaan tugas berdaya guna dan berhasil guna maka ditetapkan Uraian Tugas Jabatan sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengaturan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
2. Penyusunan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengaturan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan bidang ketahanan pangan;
3. Penyusunan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengaturan, pengembangan dan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
4. Penyusunan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengaturan, pengembangan dan pengawasan pengelolaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan tugas-tugas pembantuan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Provinsi.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan Penyusunan dan Penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta perlengkapan, keuangan, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumen peraturan perundang-undangan pada Dinas Ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan;
2. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pembinaan organisasi dan tatalaksana.

c) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penetapan Kebijakan teknis penyelenggaraan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan Perencanaan teknis konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan Koordinasi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. Pelaksanaan identifikasi pangan pokok masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku local;
6. Pelaksanaan analisis pola konsumsi pangan pokok masyarakat;
7. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan konsumsi pangan pokok masyarakat;
8. Pelaksanaan pembinaan, penerapan standar teknis di bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;

9. Pelaksanaan promosi panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
10. Pelaksanaan pengembangan panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
11. Pembinaan dalam peningkatan produksi pangan lokal berbasis sumber daya lokal;
12. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan baik tingkat kabupaten, provinsi dan instansi terkait lainnya; dan
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas.

d) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, identifikasi, pembinaan, pemantauan, pengembangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketersediaan, distribusi, akses, harga, cadangan pangan serta pencegahan dan penanganan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan ketersediaan, distribusi, akses, harga, cadangan serta pencegahan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Pemberian petunjuk, pembinaan dan arahan kepada bawahan pada Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan;
3. Pelaksanaan koordinasi, perolehan data, identifikasi dan penyusunan serta analisa ketersediaan pangan masyarakat dan sasaran produksi pangan daerah, Neraca Bahan

Makanan (NBM), pola pangan harapan (PPH) ketersediaan, pola panen, cadangan menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi SKPG, ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) wilayah kabupaten;

4. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Ketersediaan Distribusi Cadangan dan Kerawanan Pangan;
5. Pelaksanaan pembinaan ketersediaan dan kerawanan pangan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi ketersediaan bahan pangan menjelang hari besar keagamaan;
7. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab;
8. pelaksanaan identifikasi dan pengendalian kerawanan pangan wilayah kabupaten;
9. Pelaksanaan perencanaan distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
10. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis operasional distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
11. Pelaksanaan penyusunan pedoman/juklak pengembangan distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
12. Pelaksanaan analisis sistem distribusi, harga dan akses pangan;
13. Pelaksanaan fasilitasi dan supervisi/pemantauan kegiatan distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;

14. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan tingkat kabupaten, kecamatan dan pihak terkait lainnya;
15. Pelaksanaan pembinaan petugas analisis ketersediaan, distribusi, cadangan dan kerawanan pangankabupaten dan kecamatan;
16. Pelaksanaan identifikasi distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
17. Pelaksanaan koordinasi pencegahan penurunan cadangan pangan masyarakat;
18. Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan kecamatan;
19. Pengendalian cadangan pangan wilayah kabupaten;
20. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
21. Pemberian petunjuk kepada bawahan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
22. Pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan para bawahan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
23. Penilaian prestasi kerja bawahan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

B. Pengorganisasian Tim Efektif untuk Pencapaian Target Jangka Pendek dan Menengah

Pengorganisasian tim Kerja jangka pendek ini meliputi pengorganisasian tim kerja dengan membentuk Tim Kerja dalam menyelesaikan program. Pengorganisasian tim kerja dalam memenuhi target jangka pendek dan menengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin timur ini dilakukan membentuk Tim Efektif yang berada dibawah koordinasi dengan susunan Pokja/Tim adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Ketua : Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Wakil Ketua : Kasi Terkait
4. Sekretaris : Kasi terkait
5. Bendahara : Kasi terkait
6. Anggota : seluruh staf terkait
7. Pokja I s/d IV : seluruh staf terkait dibantu stakeholder eksternal

Tugas umum pokja antara lain:

- a. Menemukenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi
- c. Menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi

- d. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis konsolidasi data dan informasi ketersediaan pangan dan gizi secara regular (bulanan dan tahunan)
- e. Melakukan sosialisasi;

Secara khusus tugas Pokja/Tim Efektif antara lain:

- a) Menyusun Juknis Implementasi POAC dalam sebagai Startegi Pembangunan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b) Menyusun Sasararan Produksi, Produktifitas, Luas Tanamam, dan Luas Panen Komoditas Pertanian di Kabupaten Kotim dengan SK Bupati;
- c) Menyusun SK Dewan ketahanan Pangan dan menjalankan fungsi kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d) Menyusun dan Menganalisis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
- e) Menyusun dan Menganalisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan;
- f) Melaksanakan Pelatihan manajemen bagi Sumberdaya Petani;
- g) Menyusun dan membuat Rekomendasi dari hasil analisis kepada Penentu kebijakan selanjutnya sebagai dasar perencanaan berikutnya;
- h) Menyusun Regulasi tentang Cadangan Pangan Daerah;
- i) Menyusun dan membuat Website Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang informatif dan komunikatif.

C. Membentuk dan Memaksimalkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (DKP Kab.Kotim).

Sesuai dengan isi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, terdapat tiga tingkatan kelembagaan DKP yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/ kota. Setiap tingkatan memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan otoritas masing-masing.

Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja DKP Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua DKP Kabupaten. Susunan keanggotaan DKP Kabupaten terdiri dari Ketua, Ketua Harian, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota.

Ketua	: Bupati
Ketua Harian	: Wakil Bupati/Sekretaris Daerah
Sekretaris	
Merangkap Anggota	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Anggota	: Badan/Dinas/Unit Kerja Teknis terkait ketahanan pangan

a. Tugas DKP Kabupaten Kotim mempunyai tugas membantu Bupati:

- 1) Merumuskan kebijakan/program Bupati selaku ketua DKP kabupaten dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi;
- 2) Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan;

- 3) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan pangan di tingkat kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DKP, Ketua DKP Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat:
 - Mengundang Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja Perangkat Daerah; tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi atau pertemuan DKP;
 - Membentuk Pokja Teknis dan Pokja-Pokja lain yang dianggap perlu dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Fungsi DKP Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam melaksanakan tugas tersebut, DKP Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pangan, antara lain mencakup peningkatan produksi pangan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha pangan, penguatan distribusi, logistik dan cadangan pangan wilayah, penganekaragaman pangan, pencegahan serta penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- 2) Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dengan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional program pembangunan pangan;
- 3) Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta, serta lembaga masyarakat

untuk meningkatkan efektifitas program pembangunan pangan wilayah.

c. Kelompok Kerja DKP Kabupaten Kotawaringin Timur

Untuk pelaksanaan tugas DKP, Ketua DKP Kabupaten Kotawaringin Timur dapat membentuk Pokja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur perguruan tinggi, pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha maupun elemen masyarakat lainnya yang dipandang perlu oleh masing-masing daerah.

Tugas Pokja antara lain:

- 1) Memberikan masukan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan/program pembangunan pangan wilayah;
- 2) Menyampaikan informasi aktual mengenai status ketahanan pangan dan gizi masyarakat, melakukan analisis dan selanjutnya memberikan masukan sebagai bahan kebijakan/program penanganan masalah-masalah pangan dan gizi kepada Bupati selaku Ketua DKP Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- 3) Membantu mengevaluasi implementasi program DKP yang telah dilaksanakan.

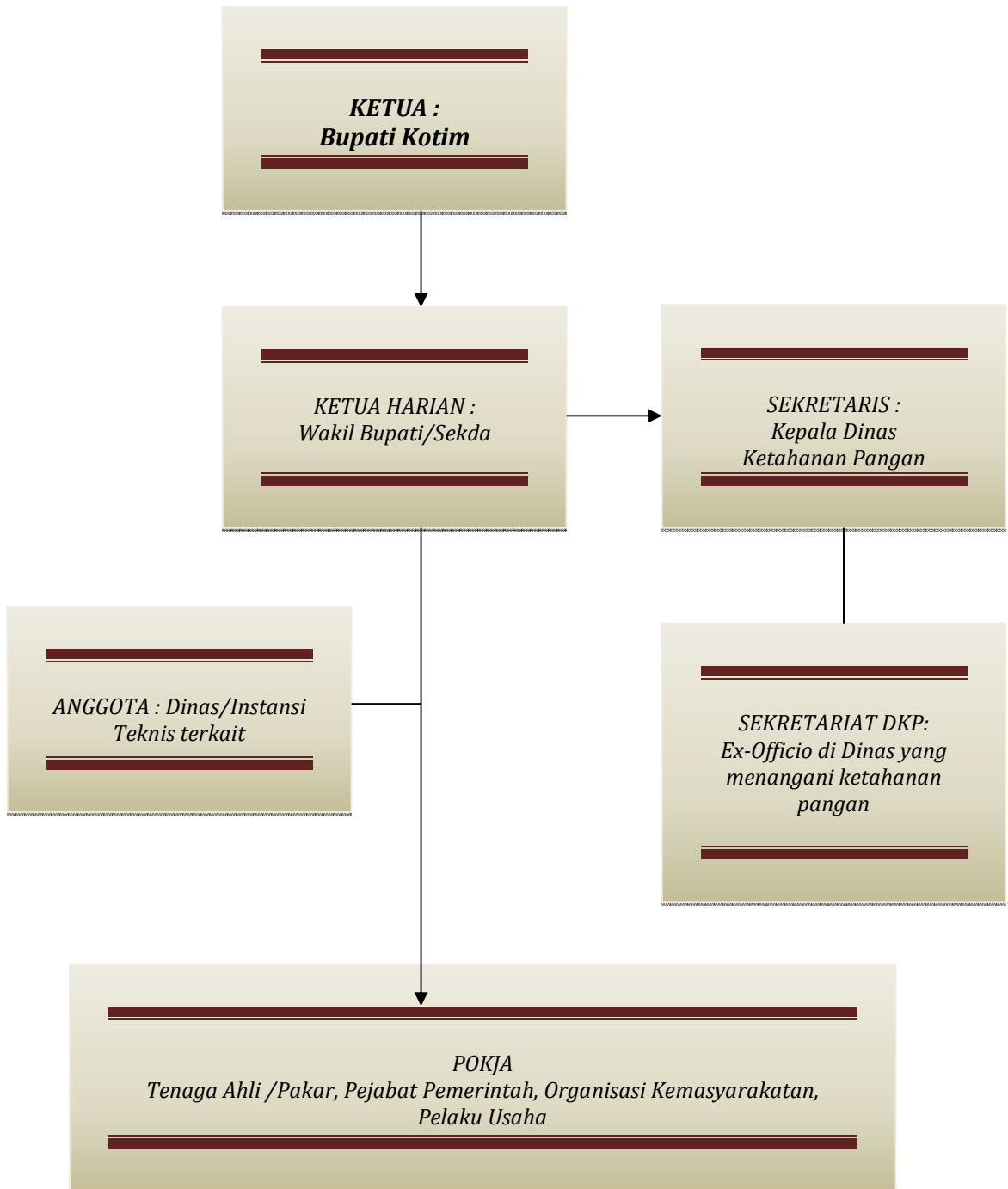
d. Sekretariat DKP Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam melaksanakan tugas DKP Kabupaten dibantu oleh Sekretariat DKP Kabupaten yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua DKP Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tugas Sekretariat DKP Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain:

- 1) Menyusun Program Kerja DKP kabupaten Kotawaringin Timur ;
- 2) Menyiapkan bahan (data dan referensi) untuk penyusunan kebijakan Bupati selaku Ketua DKP Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 3) Menyiapkan draft bahan rapat koordinasi (pembuatan makalah, tayangan dan sambutan, dll);
- 4) Melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan menganalisis data serta informasi yang akurat yang dibutuhkan DKP kabupaten Kotawaringin Timur ;
- 5) Menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi lintas sektor dalam pencapaian target dan sasaran pangan wilayah.
- 6) Melakukan koordinasi dengan Pokja dan stakeholder lainnya dalam penyusunan bahan kebijakan yang akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi DKP;
- 7) Menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua DKP Kabupaten Kotawaringin Timur.

e. Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur



Tabel 9. Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB III.
PENGAWASAN (CONTROLLING) IMPLEMENTASI POAC SEBAGAI
STRATEGI KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DI KAB.KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam suatu organisasi fungsi pengawasan sangat dibutuhkan, dengan pengawasan yang baik dapat mencegah timbulnya penyimpangan dan menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Proses pengawasan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam program implementasi POAC sebagai Strategi Pembangunan Kemandirian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur ini, Pengawasan terkait dengan penggunaan anggaran oleh pemerintah dilakukan melalui aparat pengawas fungsional.

Pengawasan langsung oleh masyarakat berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dilakukan dengan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Penyebarluasan informasi yang dilakukan melalui penyediaan Website Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang memuat berbagai informasi terkait dengan ketersediaan pangan khususnya hasil Analisis

Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Pelaporan

- a. Pokja/Tim teknis mengumpulkan data kemudian menganalisa dan membahas laporan sehingga tersusun informasi tentang situasi pangan dan gizi wilayahnya setiap bulan secara berkesinambungan.
- b. Pokja menyampaikan informasi/laporan tersebut kepada Bupati secara berkesinambungan.
- c. Bilamana terjadi masalah, maka Pokja menyusun alternatif pemecahan masalah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh Bupati.
- d. Pokja mengkompilasi laporan dan menyampaikan informasi terkait laporan tersebut melalui website resmi daerah.
- e. Pembahasan situasi pangan dan gizi dilaksanakan oleh Pokja yang dikoordinasikan oleh DKP/TPG kabupaten, dan dilakukan secara rutin setiap bulan.
- f. Kepala Daerah memimpin rapat koordinasi ketahanan pangan di tingkat kabupaten secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rapat dan koordinasi DKP Kabupaten diikuti oleh SOPD dan Pokja DKP Kabupaten.
- g. Kepala Daerah juga menghadiri rapat dan koordinasi yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Sekretariat DKP Kabupaten menyiapkan dan memfasilitasi

pelaksanaan kegiatan rapat dan koordinasi DKP Kabupaten.

- h. Hasil rapat yang telah disepakati wajib didokumentasikan dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada setiap tingkat dengan harapan agar dapat diperoleh gambaran situasi produksi dan ketersediaan pangan, situasi gizi dan kemiskinan pada setiap wilayah sebagai bahan untuk penyusunan kebijaksanaan/program pembangunan pangan dan gizi. Evaluasi tiap tingkatan dilaksanakan dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan melalui rapat/pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai Ketua DKP Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk teknis Program Implementasi POAC sebagai Strategi Pembangunan dan Kemandirian Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur ini dimaksudkan sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan penyusunan sasaran produksi, analisis SKPG, NMB, PPH, Peningkatan Manajemen Sumberdaya Petani dan Optimalisasi Kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin serta mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui penyusunan website Dinas Ketahanan Pangan sebagai fungsi control kinerja yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan analisis yang terkait ketahanan pangan maupun peningkatan sumberdaya ketahanan pangan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Melalui sistem koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik maka ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan akan dapat segera terwujud. Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan koordinasi DKP yaitu peran aktif Sekretariat DKP dalam melakukan sinergitas lintas sektor. Disamping itu, peran aktif para pemangku kepentingan, arah kebijakan politik, serta dukungan anggaran menjadi faktor penentu dalam pencapaian pembangunan.